

Mahfud MD: Tidak Semua Kebijakan Pemerintah 'Gelap', Pak Prabowo Betul Menurut Saya

Category: Politik

written by Redaksi | 20/02/2025



ORINews.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang [Politik](#), Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) [Mahfud MD](#). menyebut banyak kebijakan pemerintahan Presiden [Prabowo Subianto](#) yang “terang” dan perlu dihormati.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md. di Balairung Universitas Gadjadara (UGM), Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis (20/2/2025), merespons tagar “Indonesia Gelap” yang ramai diperbincangkan di media sosial.

“Oh tidak, tidak seluruhnya ‘gelap’. Banyak juga yang ‘terang’ dan yang terang itu tidak perlu diprotes ‘kan,” tutur Mahfud.

Menurut dia, meski ada yang perlu dikritisi, bukan berarti semua kebijakan pemerintah buruk.

Mahfud lantas mencontohkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi.

“Saya kira bagus sebagai sebuah program,” ujar dia.

Selain itu, Mahfud juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah saat ini.

Ia berpendapat bahwa efisiensi merupakan langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

“Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien,” kata Mahfud.

Mahfud lantas mengingatkan kepada semua pihak bahwa inefisiensi sejatinya sudah menjadi persoalan sejak masa Orde Baru.

Dengan mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo yang tak lain ayah Presiden [Prabowo](#), dia menyebut tingkat inefisiensi kala itu mencapai 30 persen.

“Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu,” ujar dia.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa penerapan efisiensi juga harus secara selektif sehingga tidak asal menysasar anggaran di sektor-sektor yang justru membutuhkan perhatian lebih besar.

“Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu ‘kan kurang,” jelasnya.

Menurut Mahfud, kebijakan itu perlu menysasar pengeluaran negara yang tidak efisien seperti kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak penting, serta praktik flexing (pamer) di kalangan pejabat dengan memanfaatkan anggaran negara.

“Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Prabowo betul menurut saya,” ucap Mahfud.[source:*inilah*]